

ISSN: 2086-6305

# Aspirasi

VOL. 10 NO. 1, JUNI 2019

JURNAL MASALAH-MASALAH SOSIAL

- Peningkatan Kualitas Pendidikan:  
Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia  
**Fieka Nurul Arifa, Ujjianto Singgih Prayitno**
- Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan  
**Sali Susiana**
- Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan:  
Studi dari Pesantren  
**Achmad Muchaddam Fahham**
- Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah  
**Yulia Indahri**
- Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi  
**Indrawaty Gita, Mohammad Mulyadi**

ASP	Vol. 10	No. 1	Hlm. 1-75	Jakarta Juni 2019	ISSN 2086-6305
-----	---------	-------	--------------	----------------------	-------------------



Diterbitkan Oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Pengantar Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-ix
Peningkatan Kualitas Pendidikan:	
Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia oleh: Fieka Nurul Arifa dan Ujianto Singgih Prayitno .....	1-17
Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan oleh: Sali Susiana.....	19-31
Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan:	
Studi dari Pesantren oleh: Achmad Muchaddam Fahham .....	33-47
Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah oleh: Yulia Indahri.....	49-60
Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi oleh: Indrawaty Gita dan Mohammad Mulyadi.....	61-75
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Aspirasi kembali hadir di hadapan pembaca, kali ini jurnal Aspirasi hadir dengan lima artikel pilihan redaksi. Kelima artikel ini telah melalui telaah para reviewer, editor, dan proofreader, serta telah melalui proses check plagiarism.

Artikel pertama ditulis oleh Fieka Nurul Arifa dan Ujianto Singgih Prayitno, kedua penulis secara khusus menelaah kebijakan pendidikan profesi guru prajabatan dalam pemenuhan kebutuhan guru profesional di Indonesia. Hasil studinya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan profesi guru prajabatan masih terkendala oleh (1) kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Karena itu perlu ada perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Artikel kedua ditulis oleh Sali Susiana. Secara khusus ia menelaah peran program keluarga harapan dalam menurunkan angka kematian ibu. Studi tersebut dilakukan di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Dalam studi itu, Sali menemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan AKI, karena tidak ada ketentuan yang rinci mengenai persentase uang tunai yang diterima dari PKH yang harus dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas gizi ibu hamil penerima PKH, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu hamil dan penurunan AKI. Selain itu, tidak semua ibu hamil memeriksakan diri minimal 4 kali selama kehamilan. Kedua provinsi tidak menyelenggarakan program khusus bagi ibu hamil penerima PKH. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah dan biskuit, serta penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam menurunkan AKI, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada ibu hamil penerima PKH.

Artikel ketiga ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham, Dalam tulisan tersebut, ia menelaah kondisi sanitasi dan dampaknya bagi kesehatan santri pesantren. Hasil studinya menyimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di berbagai wilayah di Indonesia belum memiliki sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut memiliki dampak bagi kesehatan santri. Banyak santri yang pernah terkena skabies, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ada dua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membantu pesantren keluar dari masalah sanitasi yang dihadapinya, yakni Pos Kesehatan Pesantren dari Kementerian Kesehatan dan eco-pesantren Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, belum semua pesantren dapat mengakses salah satu kebijakan tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan jangkauan program pos kesehatan pesantren dan eco-pesantren.

Artikel keempat menelaah peran sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah. Artikel tersebut ditulis oleh Yulia Indahri. Hasil studinya menyimpulkan bahwa penambahan alokasi anggaran perlu terus mendengarkan masukan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa.

Artikel kelima menelaah implementasi kebijakan program pembangunan partisipatif berbasis komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Artikel ini ditulis oleh Indrawaty Gita dan Mohammad Mulyadi. Studi ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan program pembangunan partisipatif berjalan baik, karena didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi, yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya, yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK, yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/ birokrasi, yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

Itulah gambaran umum isi lima artikel yang diterbitkan oleh jurnal Aspirasi Volume 10 Nomor 1 Juni 2019. Semoga lima artikel tersebut dapat memperluas pandangan dan cakrawala pembaca sekalian.

Redaksi berharap semoga dalam volume berikutnya, redaksi dapat kembali menghadirkan artikel-artikel yang menarik minat pembaca sekalian.

Jakarta, 29 Juni 2019  
Redaksi

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

Vol. 10 No. 1 Juni 2019

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Fieka Nurul Arifa**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Ujianto Singgih Prayitno**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Peningkatan Kualitas Pendidikan:  
Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam  
Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019  
halaman 1-17**

**ABSTRACT**

*The quality of education of a nation is determined by the quality of educators. Teachers as implementers of education at the basic, secondary and early age levels must have competencies and qualifications that meet national education standards. The Pre-service Teacher Professional Education Programs is a breakthrough to prepare certified professional teacher candidates. Teacher's requirements for academic qualifications are at least bachelor and must also have an educator certificate obtained through a certification program. With the end of certification through Teacher Professional Education and Training Programs, the entire certification process is taken through Teacher Professional Education Programs. This study uses a qualitative approach with library research method to find out ways in which the Pre-service Teacher Professional Education Programs policy meet the needs of professional teachers in Indonesia. In the implementation of Pre-service Teacher Professional Education Programs, there are still some challenges, namely: (1) the quality of Educational Personnel Education Institution, (2) the qualifications of prospective students, and (3) distribution of graduates. There needs to be improvements in terms of governance and regulation to improve the effectiveness of the Pre-service Teacher Professional Education Programs.*

**Keywords:** *quality of education, professional teacher, Pre-service Teacher Professional Education Programs.*

**ABSTRAK**

Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam pemenuhan kebutuhan guru profesional di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan masih terkendala: (1) kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Perlu adanya perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

**Kata kunci:** kualitas pendidikan, guru profesional, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

Vol. 10 No. 1 Juni 2019

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Sali Susiana**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019**  
**halaman 19-31**

**ABSTRACT**

*The study was conducted with a qualitative approach to see how the Family Hope Program (PKH) played a role in decreasing Maternal Mortality Rate (MMR) in Jambi and South Kalimantan Provinces. Data were obtained from interviews with PKH management officials, PKH assistants and PKH recipients who were pregnant. It was found that there was no direct connection between PKH and the decline in MMR, because there was no detailed provision regarding the percentage of cash received from PKH that had to be spent to improve the nutritional quality of PKH recipients, thus influencing the quality of maternal health and reducing MMR. In addition, not all pregnant women check themselves at a minimum of 4 times during pregnancy. The two provinces do not hold special programs for pregnant women receiving PKH. Nevertheless, there were several efforts to improve the quality of health and nutrition of pregnant women from the Ministry of Health, namely through the provision of blood tablets and biscuits, as well as the implementation of the Class for Pregnant Women. To increase the effectiveness of PKH in reducing MMR, it is necessary to periodically provide assistance and monitoring to PKH recipients who were pregnant.*

**Keywords:** *women's reproductive health, Hope Family Program, Maternal Mortality Rate.*

**ABSTRAK**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Data diperoleh dari wawancara kepada pejabat pengelola PKH, pendamping PKH dan ibu hamil penerima PKH. Ditemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan AKI, karena tidak ada ketentuan yang rinci mengenai persentase uang tunai yang diterima dari PKH yang harus dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas gizi ibu hamil penerima PKH, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu hamil dan penurunan AKI. Selain itu, tidak semua ibu hamil memeriksakan diri minimal 4 kali selama kehamilan. Kedua provinsi tidak menyelenggarakan program khusus bagi ibu hamil penerima PKH. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah dan biskuit, serta penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam menurunkan AKI, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada ibu hamil penerima PKH.

**Kata kunci:** kesehatan reproduksi perempuan, Program Keluarga Harapan, Angka Kematian Ibu.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

Vol. 10 No. 1 Juni 2019

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Achmad Muchaddam Fahham**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan: Studi dari Pesantren**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019**

**halaman 33-47**

**ABSTRACT**

*According to the United Nations, sanitation is one of the basic human rights. Sanitation impacts the quality of human life, including in Islamic boarding schools - institutions that organized Islamic religious education. The Islamic boarding houses should meet the sanitation standard to create a conducive environment for the students. This study was conducted using a qualitative method to determine sanitation conditions of Islamic boarding school, the impact of sanitation on the school to students' health conditions, and government policies on sanitation problems faced by the boarding school. Data collection were conducted using in-depth interviews and literature studies, which then analyzed by reducing techniques and drawing conclusions. The study concluded that most Islamic boarding schools in various regions in Indonesia do not have sanitation that met health standards. These conditions have an impact on the health of the students. Many of them have been exposed to scabies, diarrhea, and Acute Respiratory Infection (ARI). There are two government policies implemented to help Islamic boarding schools dealing with sanitation problems: boarding schools health program of the ministry of health and eco-pesantren program of the ministry of environment. However, not all Islamic boarding school have access to any one of these programs. Thus, the government needs to expand the coverage of the boarding school health program and eco-pesantren program.*

**Keywords:** *sanitation, water, scabies, eco-pesantren, and health.*

**ABSTRAK**

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sanitasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Sanitasi memengaruhi kualitas hidup manusia, termasuk di pesantren yang merupakan institusi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. Di pondok tempat tinggal santri seyogyanya memenuhi standar sanitasi agar santri dapat beraktivitas dengan nyaman sesuai dengan tuntunan Islam. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengetahui kondisi sanitasi pesantren, dampak sanitasi pesantren terhadap kesehatan santri, dan kebijakan pemerintah terhadap masalah sanitasi yang dihadapi oleh pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi dan penarikan kesimpulan. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di berbagai wilayah di Indonesia belum memiliki sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut memiliki dampak bagi kesehatan santri. Banyak santri yang pernah terkena skabies, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ada dua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membantu pesantren keluar dari masalah sanitasi yang dihadapinya, yakni Pos Kesehatan Pesantren dari Kementerian Kesehatan dan eco-pesantren Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, belum semua pesantren dapat mengakses salah satu kebijakan tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan jangkauan program pos kesehatan pesantren dan eco-pesantren.

**Kata kunci:** sanitasi, air, skabies, eco-pesantren, dan kesehatan.



**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

Vol. 10 No. 1 Juni 2019

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Yulia Indahri**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019**  
**halaman 49-60**

**ABSTRACT**

*TSchool Operational Grant (BOS) is a program that absorbs large enough funds and received directly by beneficiaries, schools. The BOS program began on July 2005 in order to accelerate 9-year compulsory education, reduce dropout rates, and assist students from poor families to continue schooling. However, there were also an indication that the government wanted to invite stakeholders, namely schools and the committee, to actively involve in the implementation of the program. Although the funds received by students through their school have not reached the ideal, at least the minimum service requirement can be met. This paper uses literature studies and field studies in three provinces in Indonesia, namely Aceh, West Kalimantan, and North Sulawesi for comparison. Literature studies among which are based on the study and research conducted on the BOS Program by third parties such as SMERU and the World Bank. While field studies were conducted in order to understand problems on the implementation of BOS Program especially on stakeholders' participation. As conclusion, it is seen that the addition of budget allocations should continue to pay more attention to suggestions from provincial/district/city governments, as well as from the community. Community participation, especially when it comes to funding, should not be unsupervised. There must be certainty of transparency and accountability of the use of funds that are constantly being reported to the public and not of a coercive nature.*

**Keywords:** *grant, education, school.*

**ABSTRAK**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang menyerap dana cukup besar dan langsung diterima oleh penerima bantuan, yaitu sekolah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah. Akan tetapi, ada keinginan dari pemerintah agar pemangku kepentingan, yakni sekolah dan komite sekolah, mau terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Walaupun dana yang diterima oleh siswa melalui sekolah belum mencapai angka ideal, paling tidak kebutuhan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara untuk perbandingan. Studi pustaka di antaranya adalah kajian dan penelitian yang dilakukan mengenai Program BOS oleh lembaga penelitian SMERU dan juga Bank Dunia. Studi di lapangan dilakukan untuk melihat kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan Program BOS terutama dalam kaitannya dengan peran serta pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi anggaran perlu terus mendengarkan masukan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa.

**Kata kunci:** bantuan, pendidikan, sekolah.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 10 No. 1 Juni 2019**

**ISSN: 286-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Indrawaty Gita**

*Pemerintah Kota Bekasi*

**Mohammad Mulyadi**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019**  
**halaman 61-75**

**ABSTRACT**

*The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the implementation of the P3BK policy in Pondok Melati District, Bekasi City. This research is qualitative in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK pelaksanas, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the pelaksanas of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent and capable enough human resources; (3) the disposition/attitude of P3BK pelaksanas: sufficient capacity and capability and high dedication of P3BK pelaksanas; (4) organizational structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program pelaksana has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.*

**Keywords:** *Development, Participation, Policy, Community.*

**ABSTRAK**

Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi, yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya, yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK, yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi, yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

**Kata kunci:** *Pembangunan, Partisipasi, Kebijakan, Komunitas.*